

PROPOSAL KEGIATAN

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI  
KABUPATEN BATANG



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
PURWOKERTO  
2013

**PROPOSAL KEGIATAN**

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI  
KABUPATEN BATANG**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
PURWOKERTO  
2013**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Grendeng - Purwokerto 53122  
Telepon (0281) 638339, Faks. (0281) 627203  
Laman : [www.fh.unsoed.ac.id](http://www.fh.unsoed.ac.id), email: [fh@unsoed.ac.id](mailto:fh@unsoed.ac.id)

1. Nama Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)
2. Ketua Tim
  - a. Nama : Dr. Muhammad Fauzan, SH.,MHum.
  - b. NIP. : 19650520 199003 1 003
  - c. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - d. Bidang Keahlian : Hukum Pemerintahan Daerah
  - e. Lembaga : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
3. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Batang
4. Lama Kegiatan : 45 (empat puluh lima) hari kalender
5. Biaya : Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
6. Sumber Dana : APBD Kab. Batang

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.  
NIP. 19640923 198901 1 001

Purwokerto, 5 Maret 2013  
Ketua Tim Pelaksana

Dr. Muhammad Fauzan, SH., M.Hum.  
NIP. 19650520 199003 1 003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Grendeng - Purwokerto 53122  
Telepon (0281) 638339, Faks. (0281) 627203  
Laman : [www.fh.unsoed.ac.id](http://www.fh.unsoed.ac.id), email: [fh@unsoed.ac.id](mailto:fh@unsoed.ac.id)

---

**PROPOSAL KEGIATAN**

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI  
KABUPATEN BATANG**

**A. Latar Belakang**

Kegiatan pembangunan sebagai aktifitas sadar yang dilakukan oleh segenap elemen masyarakat dengan dipandu oleh Pemerintah yang dilaksanakan di seluruh wilayah tanah air pada dasarnya merupakan pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, berlangsung secara terus-menerus untuk mewujudkan tujuan yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Hal tersebut merupakan cerminan dari semangat yang ingin diwujudkan oleh para pendiri negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Demikian halnya pembangunan di daerah termasuk Kabupaten Batang, rencana pembangunan daerah secara umum telah



dirumuskan dalam sebuah dokumen resmi yakni dituangkan dalam Rencana Pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang (RPJP/RPJMD), dan kemudian ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang / Menengah Daerah (Perda tentang RPJP/RPJMD).

Dengan kewenangan yang dimiliki daerah mengandung konsekuensi bahwa pemerintah daerah harus mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan menurut prakarsa dan aspirasi sesuai dengan kondisi dan keadaan setempat. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu memberikan pelayanan publik secara maksimal dengan mendayagunakan aset daerah dalam menyelenggarakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Batang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa upaya untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka bangsa Indonesia harus senantiasa melaksanakan pembangunan di bidang agama mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mensukseskan pembangunan. Guna mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, merupakan kewajiban setiap orang Islam yang mampu untuk menunaikannya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak sesuai dengan ketentuan agama. Infaq, shadaqah, hibah, waris, wasiat, maupun kafarat juga merupakan tuntunan ajaran agama yang potensial menghasilkan dana masyarakat yang sangat besar. Dengan pengelolaan yang baik dapat memanfaatkan secara maksimal untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 setidaknya mengindikasikan dua hal. *Pertama*, formalisasi syariat, yang menandakan bahwa UUPZ tidak sekular dan tidak tepat diposisikan (digugat dan dikritik) semata-

mata dengan pertimbangan konstitusional tanpa argumentasi syariat. *Kedua*, adanya proses ijtihad, yang menandakan bahwa undang-undang tidak mutlak seperti halnya syariat islam itu sendiri. (Zenno Noeralamsyah dan Irfan Syauqi Beik, *Republika*, Kamis 27 September 2012, hal. 23).

Indikator pertama membuktikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai bentuk keleluasaan umat islam untuk mengatur urusan yang bertalian dengan ibadah social secara formal melalui hukum positif, disamping bentuk formalisasi syariat lainnya seperti tatakelola urusan haji dan perkawinan.

Sedangkan Indikator kedua, pertimbangan (butir e) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti, menandakan bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 merupakan hasil ijtihad yang berubah sesuai dengan telaah ilmiah dan upaya penemuan aspek kemaslahatan publik, dan bukan hukum yang berdiri sendiri serta terlepas dari matriks hukum syariat.

Berdasarkan studi lapangan, potensi Kabupaten Batang untuk berperan serta mewujudkan cita-cita nasional yakni membentuk masyarakat yang memiliki tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang baik sangat terbuka, hal tersebut dapat dilihat dari potensi zakat di Kabupaten Batang cukup besar, paling tidak dari hasil



*hearing* dengan Komisi A DPRD Kabupaten Batang terekam kurang lebih ada 8.500 pegawai yang bila membayar zakat akan mendapatkan Rp. 15 M/tahun.

Memperhatikan hal tersebut, maka agar potensi besar yang dimiliki oleh Kabupaten Batang dapat digali dengan baik dan terencana serta memperoleh landasan hukum yang kuat, maka urgensi penyusunan raperda tentang Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) merupakan kebutuhan yang sangat strategis dalam rangka memberikan jaminan kepastian dan kejelasan terhadap langkah pemerintah daerah dalam berupaya memberikan kontribusi merealisasikan tujuan nasional dalam kehidupan masyarakat.

## **B. Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Batang bertujuan untuk memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis dan yuridis tentang perlunya Peraturan Daerah tentang Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Batang. Naskah akademik yang diajukan diharapkan dapat menjadi panduan bagi DPRD untuk mengkaji dan memutuskan isi materi rancangan perda. Secara umum tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Batang
2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Batang

### **C. Metode**

Dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Raperda Tentang Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Batang ini dilakukan dengan penelitian kualitatif, dengan metode penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan, memberikan pengertian, serta menggali penyebab, alasan-alasan hingga ke akar-akarnya (Sriyuningsih, 2003). Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah observasi partisipatori dengan metode ini maka cara berdiskusi dengan orang-orang yang diteliti dan mengajak mereka "meneliti" bersama-sama peneliti tentang hal-hal yang terkait dengan rancangan peraturan daerah Tentang Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Batang

Penyusunan Naskah Akademik juga dilakukan dengan menggunakan bahan hukum dan informasi yang diperoleh dianalisa menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan-

bahan non hukum. Bahan-bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan data sekunder saja untuk melakukan penelitian dan untuk mendapatkan hasil yang obyektif dari penelitian. Dari data sekunder tersebut tiga bahan hukum yaitu: Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) dan mengikat, Bahan Hukum Sekunder, yaitu seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri namun secara formil, tidak dapat dikategorikan sebagai hukum positif. (Peter Mahmud Marzuki, 2005)

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer mencakup data-data lapangan yang diperoleh baik melalui wawancara, kuesioner maupun data dokumentasi yang diperoleh dari instansi terkait di Kabupaten Batang. Bahan hukum ini mencakup pula data dokumen yang diperoleh dari seminar, makalah maupun buku dan teori ilmiah yang terkait. Bahan Hukum primer juga diperoleh dengan proses dengar pendapat (*hearing*) yang diperoleh dengan para stakeholder terkait.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup semua data perundang-undangan yang relevan.

Teknik analisa isi dilakukan terhadap bahan-bahan hukum (teks perundang-undangan dan penjelasannya) yang dimiliki untuk



mengetahui maksud, konteks hukum, interpretasi dan keterkaitannya. dengan isu tentang Pengelolaan zakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah yang dibuat memiliki landasan hukum yang jelas serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **D. Lokasi Kegiatan**

Lokasi kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) dilakukan di Kabupaten Batang.

#### **E. PENDANAAN**

Biaya pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Batang adalah sebesar Rp. 75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) yang dibebankan pada APBD Kabupaten Batang.

#### **F. Hasil Yang Diharapkan**

Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Batang

#### **G. Jangka Waktu Kegiatan**

Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 45 hari kalender.

#### **H. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan penyusunan naskah akademik dilakukan selama 45 hari kalender dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Bulan I					Bulan II					
		Minggu Ke	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Pengumpulan Bahan Sekunder		■									
2	Pengumpulan Bahan Primer			■								
3	Pengolahan Data Awal				■							
4	Penyusunan Naskah Akademik				■	■	■					
5	Dengar Pendapat dengan Pemangku kepentingan							■				
6	Penyusunan Laporan Akhir								■			
7	Presentasi Laporan Akhir									■		
8	Penyempurnaan Laporan Akhir										■	
9	Penyerahan Hasil Pekerjaan											■

#### I. Tim Pelaksana

No	Nama	Bidang Keahlian	Jabatan
1.	Dr. M. Fauzan, SH.,MH.	Hukum Pemerintahan Daerah	Ketua/Anggota
2.	Abdul Aziz NS, SH. MM. M.H.	Hukum Perundang-undangan	Anggota
3.	Kadar Pamuji, S.H., M.H.	Hukum Administrasi	Anggota
4.	Muksinun, S.H., M.H.	Hukum Islam	Anggota
5.	Drs. Noor Asyik, M.Ag.	Hukum Islam	Anggota

## J. Curriculum Vitae

### Ketua Tim

#### I. Identitas Diri

Nama Lengkap	:	<b>Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.</b>
Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
Pangkat/Gol/NIP		Pembina/IV-a/19650520 199003 1 003
Tempat/Tgl/Lahir	:	Purbalingga, 20 Mei 1965
Alamat Rumah	:	Jl. Bunga Rampai III No. 40 Perumnas Karangmanyar, Kalimanah, Purbalingga, Jawa Tengah.
Nomor Telepon/fax	:	(0281) 894932
Nomor HP	:	081542993899
Alamat Kantor	:	Fakultas Hukum UNSOED Kampus Grendeng, Jl. HR Boenjamin Purwokerto, Jawa Tengah.
Nomor fax	:	(0281) 638339
Alamat E-mail	:	fauzanhtn.yahoo.co.id
Lulusan yang telah dihasilkan	:	S1 = 13 orang S2 = 8 orang
a. Mata Kuliah yang diampu di S1		1. Hukum Pemerintahan Daerah 2. Hukum Kelembaganegaraan 3. Hukum Keuangan Negara
b. Mata Kuliah yang diampu di S2 Ilmu Hukum		1. Politik Hukum 2. Hukum Konstitusi 3. Negara Hukum dan Demokrasi

#### II. Riwayat Pendidikan

Program	S1	S2	S3



Nama PT	UNSOED	UNPAD	UNPAD
Bidang Ilmu	Hukum	Hukum	Hukum
Tahun Masuk	1984	1994	1999
Tahun Lulus	1989	1997	2005
Judul Skripsi/tesis/D disertasi	Peran Departemen Dalam Negeri Dalam Pembinaan Hukum Nasional	Hubungan antara Pemerintah Wilayah Kecamatan Dengan Pemerintah Dati II Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kabupaten Dati II Banyumas)	Hubungan Keuangan antara Pusat Dan Daerah Dalam Tata Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia
Nama Pembimbing/Promotor	Toto Pandoyo, S.H.	Prof.Dr.H.Bagir Manan, S.H., MCL.	Prof.Dr.H.Bagir Manan, S.H., MCL.

### III. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1.	2006	Pembubaran Partai Politik, Kerjasama Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum UNSOED dengan Mahkamah Konstitusi	DIPA Mahkamah Konstitusi	38.000.000,-
2.	2005	Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga sejak Tahun 1975 s/d 2005,	APBD Purbalingga 2005	10.000.000,-

		Kerjasama antara Pusat Kejian Hukum dan Kemitraan Daerah (PKHKD) Fakultas Hukum UNSOED dengan DPRD Kabupaten Purbalingga;		
3.	2006	Evaluasi Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	APBD Purbalingga 2006	25.000.000,-
4.	2009	Distribusi Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Kajian Tentang Model Hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota)	HB Dikti 2009	81.444.392
5.	2011	Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia  (Analisis Tentang Model Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pada Masa Yang Akan Datang)	Hibah Riset Institusional 2011	75.000.000,-

6.	2012	Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Pedoman Penetapan Batas Desa	APBD Purbalingga	75.000.000,-

#### IV. Pengalaman Penulisan Artikel Dalam Jurnal

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Vol./Nomor	Nama Jurnal
1.	2007	Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan di Inggris.	Vol. 2 No. 1	Jurnal Hukum Khaira Ummah Program MIH, UNISSULA, Semarang.
2.	2008	Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Apa yang Seharusnya Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan, Dimuat Dalam, Januari	Vol. 8 Januari 2008	Dinamika Hukum FH. UNSOED
3.	2008	Pembubaran Partai Politik.	Vol 1 No. 1	Jurnal Konstitusi
4.	2009	Terobosan Hukum Mahkamah Konstitusi	Januari 2009	Dinamika Hukum FH. UNSOED
5.	2010	Eksistensi Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Terhadap	Desember 2010	Jurnal Media Hukum UMY Vol. 17 No. 2 (Terakreditasi)



		Komisi Perlindungan Anak)		
6.	2011	Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses <i>Impeachment</i> Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	Januari 2011	Dinamika Hukum FH. UNSOED Vol. 11 No. 1 (Terakreditasi)
7.	2011	Pemilihan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Tentang Model Pemilihan Pasa Masa Yang Akan datang)	Desember 2011	Jurnal Media Hukum UMY Vol. 18 No. 2 (Terakreditasi)
8.	2012	Pasang Surut Hubungan Antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	Januari 2012	Dinamika Hukum FH UNSOED Vol. 12 No. 1 (Terakreditasi)
8	2012	Implementasi Pemerintahan Yang Bersih Dalam Kerangka Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) (Studi Di Kabupaten Pematang)	September 2012	Jurnal Dinamika Hukum FH UNSOED Vol. 12 No. 3 (Terakreditasi)

#### V. Pengalaman Penulisan Buku

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	2006	Hukum Pemerintahan Daerah (Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan	306	UII Press Yogyakarta

		Daerah)		
2.	2010	Hukum Pemerintahan Daerah (Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah) Edisi Revisi.	340	STAIN Press Purwokerto
3,	2012	Hukum Lembaga Negara : Mahkamah Agung Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia	180	Kanwa Publisher Yogyakarta

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.

Purwokerto, Maret 2013



Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650520 199003 1 003

## Anggota 1 :

- a. Nama Lengkap : Abdul Aziz  
Nasihuddin,SH,MM,MH.
- b. Tempat dan Tgl. Lahir : Blitar, 25 Maret 1960
- c. Pangkat/Gol/NIP : Lektor Kepala/IV.C/19600325  
: 198601 1 001
- d. Bidang Keahlian : Hukum Kenegaraan/HTN
- e. Pendidikan : S1 ( FH. Undip Semarang ) 1985  
: S2 ( STIE IPWI Jakarta ) 1996  
S2 ( Ilmu Hukum UI Jakarta )  
1998  
S3 (dalam proses di UGM)2009 -  
skrg

### 1. Pengalaman penelitian :

1. Wanita bekerja (Analisis Jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga ), 1995.
2. Perbuatan melawan hukum penguasa dalam sengketa lingkungan hidup, 1992.
3. Pelaksanaan azas peran serta masyarakat dalam penerbitan izin lingkungan ( *Milleu Verguning* ) , 1993.
4. Pelaksanaan titik berat otonomi daerah pada daerah tingkat II: Suatu studi kasus di Kab. Dati II Banyumas, APBN, 1995.
5. Analisis dan evaluasi hukum tentang status kota administrative dikaitkan dengan otonomi dan dekonsentrasi, (BPHN), 1998.
6. Perlindungan hukum terhadap sumber daya air di Kabupaten Dati II Banyumas, 1999.
7. Analisis dan evaluasi produk hukum di Eks Karesidenan Banyumas, Kedu dan Pekalongan, kerjasama dengan Partnership for Government Reform from Indonesia, 2001.
8. Analisis dan evaluasi produk hukum tentang pajak dan retribusi di Kabupaten Purbalingga, 2003.
9. Analisis dan evaluasi produk hukum tentang Perijinan di wilayah Barlingmascakeb kerjasama dengan Partnership for Government Reform from Indonesia, 2004.
10. Studi mengenai kesiapan pemekaran daerah Banyumas – Purwokerto untuk pengambilan kebijakan dan keputusan



Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2004.

11. Peranserta anggota DPRD dalam pengelolaan lingkungan hidup, kerjasama dengan MENLH, 2004.
12. Efektivitas dan sinkronisasi Perda-perda di Kab. Purbalingga, 2006.

## **2. Kegiatan Ilmiah :**

1. Penataran nasional hukum lingkungan dan hukum administrasi, Unair, Surabaya, 1991.
2. Kursus Amdal tipe A, Univ. Jember, 1994.
3. Pelatihan Metodologi Penelitian, LP2ES, Unsoed, 1998.
4. Penataran nasional hukum lingkungan, Unair, Surabaya, 1999.
5. Otonomi di bidang pendidikan, UMP, 2000.
6. Otonomi Daerah dan pengembangan desa, Pemalang , 2000.
7. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, BPHN, 2004.
8. Temu ilmiah Hukum berprespektif jender, UI, 2004.
9. Menggagas kurikulum hukum berprespektif jender, Undip, 2004.
10. Dasar-dasar Pembuatan Perda yang baik, DPRD Pemalang, 2004.
11. Masalah berlaku surut dalam perundang-undangan di Indonesia, DPRD Batang, 2004.
12. Peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No.10 tahun 2004, Pemda Purbalingga, 2004.
13. Menyongsong Pilkada yang damai, UMP, 2005
14. Masalah Korupsi di DPRD Banyumas ( Analisis peraturan perundang-undangan), Fak. Hukum dan Ikadin, Purwokerto, 2005.
15. Penegakan hukum pers di Indonesia, Radar Banyumas, 2005.
16. Evaluasi Pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden, KPUD Banyumas, 2005.
17. Lokakarya dan FGD evaluasi pemilu legislative dan Presiden dan Wakil Presiden, KPUD Jawa Tengah, 2005.
18. Teknik Penyusunan Perda berdasarkan UU No. 10 tahun 2004, DPRD Pemalang, 2005.

19. Problematika Penyelesaian Kasus Munir dan Menyoal RUU Intelijen, Fisip Unsoed kerjasama dengan Imparsial, 2005.
20. Penetrasi Gerakan Feminisme Dalam Intra dan Infra Struktur Negara, CW dan FH Unram, Mataram, 2005
21. Evaluasi Yuridis Perda Perijinan, KPPI Kab. Purbalingga, 2006
22. Seminiar nasional "Penegakan Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945 Dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Unsoed ke 25", 2006,9 Mei.
23. TOT Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK),DIKTI, 11 – 13 Mei 2006.
24. Lokakarya Pemanfaatan Hasil Penelitian Untuk Pengembangan Materi Ajar, Lemlit-Unsoed, 16 Mei 2006.
25. Teknik Penyusunan Naskah Akademik, DPRD Kab. Banyumas, 2005.
26. Program Legislasi Daerah, DPRD Kab. Banyumas, 2006.
27. Interpretation Course Of Baldrige Education Criteria, 2010.
28. Pendidikan Kejuruan Langkah Awal Mencegah Korupsi, 2010.
29. TOT Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010

### **3. Pengabdian Masyarakat :**

1. Pentingnya pengembangan dan peningkatan aktivitas instruksional bagi keberhasilan pendidikan di perguruan tinggi, Akper Muh.,Purwokerto, 1998.
2. Penegakan hukum lingkungan melalui peran serta masyarakat dan pertanggungjawaban hukumnya, Bapedalda, Banyumas, 1999.
3. Peningkatan peranan wanita dalam pembangunan bangsa berwawasan kemitrasejajaran yang harmonis pria dan wanita dengan pendekatan jender, RSPD, Purbalingga, 1999.
4. Membangun hukum yang responsive, RRI, 1999.
5. Hukum lingkungan, UUPLH dan AMDAL, Kec. Rawalo, 1999.
6. Sosialisasi Hand Out, Unsoed, 2000.
7. Sosialisasi Jatidiri Unsoed, Unsoed, 2000.
8. Aspek hukum peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, Bapedalda, 2000.
9. Sosialisasi system Pemilu, kerjasama Cetra dan Partnership for government reform from Indonesia, 2002.
10. Simulasi system Pemilu Presiden dan Wakil presiden, kerjasama

- Cetro dan Partnership for government reform from Indonesia, 2003.
11. Sosialisasi Rancangan Perda tentang Perijinan di wilayah Barlingmascakeb, 2004.
  12. Penyusunan Peraturan Daerah Yang Berdimensi Kerakyatan, Partnership – LPPSLH – Forum Kemanusiaan Banyumas, 2005.
  13. Prolegda dalam rangka Legislatif Drafting DPRD Kab. Banyumas, 2005.
  14. Legal Drafting DPRD Kab. Kebumen, 2006
  15. Menyongsong Pilkada Langsung, KPUD Purbalingga, 2005.
  16. Peraturan Daerah Sebagai Instrumen Hukum Kebijakan Publik, FISIP – Partnership, 2001.
  17. Dasar-dasar Evaluasi Perda, DPRD Kab. Batang, 2004.
  18. Teknis Grafis Pemilu 2004, Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2004, KPUD Banyumas, 2005.
  19. Penegakan Hukum Illegal Logging, LKHS, 2006.
  20. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2009 dan 2010.

**4. Pengalaman jabatan :**

1. 1995 - 1996 : Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat
2. 2000 – 2001 : Dekan Fakultas Hukum UMP
3. 2001 – 2002 : Pembantu Dekan I Fak. Hukum Unsoed
4. 2002 - 2004 : Dekan Fak. Hukum Unsoed
5. 2004 - 2009 : Ketua Pelti Cabang Banyumas
6. 2005 - 2010 : Tenaga Ahli DPRD Kab. Banyumas
7. 2008 – 2010 : Koord SDM Pusat P3 Unsoed.

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.

Purwokerto, Maret 2013



**Abdul Aziz Nasihuddin, S.H.,M.M.,M.H.**  
NIP: 19600325 198601 1 001



## Anggota 2 :

### CURRICULUM VITAE

1. Nama : Kadar Pamuji, S.H. M.H.
2. Tempat/Tgl/lahir : Purbalingga / 15 Nopember 1964
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pangkat/Gol/NIP : Pembina/IV.b/19641115 199002 1 001
5. Jabatan : Dosen tetap Fak. Hukum UNSOED
6. Alamat : Fakultas Hukum Unsoed Grendeng Pwt
7. Telp./Faks : 0281-638339
8. Pendidikan : 1. S-1 Univ. Jenderal Soedirman  
Purwokerto 1989  
2. S-2 Univ. Airlangga Surabaya 1998  
3. S-3 UGM Jogjakarta 2010 - sekarang

#### I. Riwayat Pekerjaan

No	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	J A B A T A N		
		NAMA JABATAN	PEJABAT YANG MENETAPKA N	NOMOR DAN TANGGAL SKEP
1	2	3	4	5
1	Penata Muda (gol. III/a).	Asisten Ahli Madya	Mendikbud R.I	438/PT30/C/2/1990
2	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)	Asisten Ahli	Mendikbud R.I	1153/PT30/c/2/1994
3	Penata (gol.III/c)	Lektor Muda	Mendikbud R.I.	379/PT30/2/1996
4	Penata Tk.I (gol.III/d)	Lektor Madya	Mendikbud R.I	993/J23/KP/2000
5	Pembina (gol.IV/a)	Lektor Kepala	Mendikbud R.I.	36604/A4.5/KP/2007

#### Pelatihan Profesional :

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
1993	Penataran Rekonstruksi Kuliah angkatan XIV	UNSOED
1996	Penataran Hukum Lingkungan	UNAIR
2005	Pelatihan Metode Penelitian Kualitatif	UNSOED
2005	Pelatihan Metode Pengajaran dengan pendekatan studi kasus	UNSOED
2006	Pelatihan Auditor Mutu Akademik Internal (AMAI)	UNSOED
2007	Pelatihan Applied Approach (AA) plus	UNSOED
2008	TOT (Paket C-1 SCBD Project)	LAN, Diklat Aparatur

**Pengalaman Jabatan**

Jabatan	Institusi	Tahun .. s.d ...
Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum	Pascasarjana Unsoed	2002 s.d 2005

**Pengalaman Mengajar**

Mata Kuliah	Jenjang	Institusi/Jurusan /Program	Tahun ... s.d ...
Ilmu Negara	S1	Fak. Hukum UNSOED	1990 s.d. 1993
Hukum Administrasi Negara I	S1	Fak. Hukum UNSOED	1990 s.d 1993
Hukum Pajak	S1	Fak. Hukum UNSOED	1991 s.d
Hukum Lingkungan	S1	Fak. Hukum UNSOED	1993 s.d 1996
Hukum Internasional	S1	Fak. Hukum UNSOED	1994 s.d 1995
Hukum Tata Negara II	S1	Fak. Hukum UNSOED	1994 s.d 1995
Hukum Administrasi Negara	S1	Fak. Hukum UNSOED	1994 sd. 2009
Hukum Pajak Khusus	S1	Fak. Hukum UNSOED	1999 s.d 2009
PLKH Ketatanegaraan	S1	Fak. Hukum UNSOED	1995 s.d 1996
Jatidiri Unsoed	S1	Fak. Hukum UNSOED	2001 s.d 2009
Hukum Administrasi	S2	Program MIH UNSOED	2006 s.d 2009

**Pengalaman Membimbing Mahasiswa**

Tahun	Pembimbingan/Pembinaan
1991 sd. 2009	Pembimbing Akademik Mahasiswa
1996 s.d 2009	Pembimbing Skripsi Mahasiswa
1996 s.d 2009	Pembimbing Seminar Mahasiswa

**Pengalaman Penelitian**

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
1990	Studi tentang kepemimpinan Kepala Desa di Kabupaten Dati II Banyumas	Anggota	SPP/DPP
1990	Tinjauan yuridis tentang analisis mengenai dampak lingkungan	Anggota	SPP/DPP
1993	Fungsi pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di	Anggota	SPP/DPP



	daerah		
1994	Pengawasan melekat (Studi tentang pelaksanaan Inpres No. 15 tahun 1983 di Kabupaten Banyumas	Anggota	Sendiri
1994	Pelaksanaan pemungutan PBB (Studi tentang upaya pencapaian pemasukan PBB di desa Karang Sari Purbalingga)	Kepala Proyek	Sendiri
1994	Sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya (Studi terhadap pelaksanaan Permendagri No. 1/1982 di desa Karang Sari Purbalingga)	Kepala Proyek	Sendiri
1996	Pelaksanaan pemungutan Pajak Radio di Kabupaten Banyumas (Studi tentang efektivitas hukum)	Kepala Proyek	SPP/DPP
1996	Penegakan hukum lingkungan (Studi terhadap penggunaan instrumen Hukum Administrasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan)	Kepala Proyek	Sendiri
1999	Tindakan hukum Pemda sebagai implementasi hak menguasai atas benda milik publik di Kab. Banyumas	Kepala Proyek	Sendiri
1999	Hak menyampaikan pendapat di muka umum di Indonesia menurut UU No. 9 tahun 1998	Kepala proyek	SPP/DPP
2003	Peran PPAT dalam Sistem Pemungutan BPHTB Di Kantor Pelayanan PBB Purwokerto	Anggota	SPP/DPP
2004	Analisis Yuridis Terhadap Produk Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Purbalingga	Anggota	SPP/DPP
2006	Kajian Materi dan Status Hukum Perda Kabupaten Purbalingga Tahun 1970 - 2005	Anggota	Pemda Purbalingga
2007	Kerangka Kebijakan Berbasis <i>Good Governance</i> Kabupaten Pemalang	Anggota	SCBD Brebes
2008	Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pembinaan calon tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga	Kepala Proyek	DIPA FH Unsoed

#### Karya Tulis Ilmiah

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2002	Kesepahaman tentang Makna Pajak dari Segi Hukum	Majalah Hukum USU Medan
2002	Konsep Benda Milik Publik Dalam Konteks Hukum Administrasi Negara	Jurnal Dinamika Hukum Unsoed
2003	Perkembangan Fungsi Legislasi DPR	Yuridika Hukum Fak Hukum UNAIR



2006	Fungsi Ekspresif dan Fungsi Instrumen UU No. 42 tahun 1999 sebagai Social Engineering di bidang Hukum Jaminan	Yuridika Hukum Fak Hukum UNAIR
2006	Dampak Globalisasi Terhadap Hukum Paten di Indonesia	Jurnal Hukum Unisulla Semarang
2007	Desentralisasi Wewenang pada Pelayanan One Stop Service (Studi tentang Desentralisasi pada pelayanan one stop service dalam peningkatan efektifitas pelayanan perizinan di Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Wonosobo)	Jurnal Hukum Unisulla Semarang
2008	Penguatan Lembaga Ombudsman Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance	Jurnal Hukum Unisulla Semarang

#### B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2000	Pelaksanaan pemerintahan menurut Hukum Administrasi Negara	Disampaikan pada Penataran PTUN di Kab. Banyumas
2009	Kekuatan dan Penerapan SK Dekan FKIK Unsoed Pada Kampus Bebas Asap Rokok	Disampaikan pada Seminar di FKIK Unsoed Purwokerto

#### Peserta Seminar/Lokakarya/Simposium :

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara
1993	Seminar Nasional : Tuntutan, tantangan dan pemantapan wawasan pembangunan nasional	Kandep Dikbud Banjarnegara
1994	Lokakarya : Teknis Administrasi Pelaksanaan kurikulum baru Fakultas Hukum Unsoed	UNSOED
1994	Seminar Nasional Hukum Agraria	UNSOED
1994	Seminar Nasional : Menuju kemandirian pembiayaan pembangunan nasional	UNSOED
1995	Seminar tentang Negara Pancasila , Hak Asasi Manusia dan Demokrasi	Fak. Hukum UI
1995	Seminar on Enhacing Students to talk in Big Classes	UNSOED
1995	Seminar Nasional : Prospektif perlindungan konsumen di Indonesia	UNSOED
1996	Seminar Nasional : Umat Islam	UNSOED

	dan Pemilu	
1999	Seminar Nasional : Menyongsong pembaharuan dan pembentukan UU Pemberantasan KKN	UNSOED
1999	Seminar Nasional: Peningkatan Kotib Purwokerto menjadi daerah Kota	UNSOED
2001	Workshop kerjasama antar daerah menuju Good Governance Di Tingkat Lokal	UNSOED
2002	Seminar Nasional dan Diskusi Perpajakan : Bagaimanakah Proses Banding Pajak Pasca Perubahan Undang-Undang Peradilan Pajak 2002	Yayasan Bina Artha Purwokerto
2002	Lokakarya Kurikulum dan Kelembagaan	UNSOED
2002	Seminar Nasional : Kajian Kritis Sistem Peradilan Pajak	UNDIP
2003	Persepsi Masyarakat Terhadap Pengertian Tindak Pelanggaran HAM yang Berat	UNSOED
2003	Seminar Nasional : Sosialisasi UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu	UNSOED
2003	Seminar Nasional : Implikasi Sosial Politik dengan Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	UNSOED
2003	Lokakarya Penyusunan Silabi HTN – HAN Asosiasi Pengajar HTN _ HAN Daerah Jawa Tengah	UNSOED
2004	Tax Teaching Workshop	Fak.Hukum UGM
2004	Seminar : Peranan Kredit Perbankan dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Intermediasi Perbankan BARLINGMASCAKEB	BI Cabang Purwokerto
2004	Semiloka Pendidikan Hukum Dengan Pendekatan Terapan	UNSOED
2006	Lokakarya Perpajakan Nasional	Pusdiklat Perpajakan
2006	Seminar Nasional : Penegakan Konstitusi pasca amandemen UUD 1945	UNSOED
2006	Lokakarya dan Penataan Kelembagaan	Fak.Hukum Unsoed
2007	Seminar Nasional : Mencari format imbal balik prestasi bagi	UNDIP



	masyarakat dalam pembiayaan melalui hasil pajak	
2007	Focus Group Discussion MPR RI	MPR RI
2007	Forum dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional bidang Hukum Administrasi Negara	BPHN Dephunham
2008	Seminar Nasional Wawasan Kebangsaan	Mensekneg RI

#### Kegiatan Profesional/Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahun	Kegiatan
1990 s.d 2009	Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat
1994 s/d 1997	Penatar dalam Penataran P4 Pola Pendukung 100 jam bagi mahasiswa
2006	Optimaslisasi fungsi DPRD berdasar UU No. 32/2004 (Bimbingan Teknis)
2007	Pelatihan Legal Drafting bagi Pejabat Eselon IV di Kabupaten Pematang
2008	Pelatihan Legal Drafting bagi Pejabat Eselon IV di Kabupaten Brebes

#### Penghargaan/Piagam


Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2001	Dosen Teladan I Tingakt Fakultas Hukum Unsoed Tahun 2000	Rektor Unsoed

#### ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Organisasi	Jabatan
2002 -	Pusat Kajian Hukum dan Kemitraan Daeran	Sekretaris
2007 -	Tax Centre Unsoed	Anggota

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.

Purwokerto, Maret 2013



Kadar Pamuji, S.H., M.H.  
NIP. 19641115 199002 1 001



**ANGGOTA 3**

1.1	Nama L:engkap (dengan gelar)	Drs. NOOR ASYIK, M.A.g. (L)
1.2	Jabatan Fungsional	Penata Tk. I / Lektor III d
1.3	NIP/NIK	19671020 199803 1 002
1.4	Tempat dan Tanggal Lahir	Kudus, Jawa Tengah 20 Oktober 1967
1.5	Alamat Rumah	Perum Pemda Jl. Sukajati Kav. 41 RT. 02/08 Bantarsoka Purwokerto
1.6	Nomor Telp./Faks.	HP. 08122716490
1.7	Alamat Kantor	Fak. Hukum Universitas Jenderal Soedirman : Jl. Prof.dr. Boenyamin, Kampus Grendeng Purwokerto
1.8	No. Telp./Faks.	0281 - 638339
1.9	Alamat E-mail	norasyk@yahoo.com
1.10	Lulusan yang telah dihasilkan	Sarjana S 1: - orang Sarjana S 2: - orang
1.11	Mata Kuliah yang diampu	1. Pendidikan Agama Islam (Unsoed) 2. Aqidah Islam (Teologi Islam) (STAIN) 3. Perkembangan Pembaharuan Modern Dalam Islam (PPMDI) (STAIN) 4. Materi PAI (STAIN)

**II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

2.1	Program	S1	S2
2.2	Nama PT	IAIN Walisongo Semarang	IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN) Jakarta
2.3	Bidang Ilmu	Tarbiyah PAI	Pengkajian Islam
2.4	Tahun Masuk	1987	1993
2.5	Tahun Lulus	1996	1999
2.6	Judul Skripsi/Tesis	Metode Menghafal Al-Qur'an dan Pemahamannya di Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an Kauman Semarang	Aborsi di Indonesia: Analisis Hukum dan Obstetri Kedokteran
2.7	Nama Pembimbing	Drs. KH. Husni Tamrin	- Prof. DR. Sukarja. M.A - DR. Nurhadi Magetsari

**III. PENGALAMAN PENELITIAN**

NO	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2005	Aborsi dalam Prespektif Hukum Pidana dan Hukum Islam.	SPP/DPP FH. Unsoed	
2	2007	Pendidikan Life Skill di LSM Biyung Emban Purwokerto	Biaya Sendiri	
3	2009	Abortus Provocatus Criminalis	Biaya Sendiri	
4	2009	Mekanisme Penyelesaian	DIPA FH 2009	

		Pelanggaran Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik,		
	2009	Kajian Historis Kompilasi Hukum Islam	FH. Unsoed	
	2010	Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak dalam Hukum Islam	FH. Unsoed	
5	2011	Tinjauan Yuridis Hukum Islam dalam Perlindungan Anak	Biaya sendiri	
6	2011	Pelacuran (Prostitusi) Tinjauan Hukum Dan Permasalahanya	Biaya Sendiri	
7	2011	Inisiasi Produk Hukum Daerah Melalui Pembentukan Model Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Luar Negeri	DIPA Unsoed 2011	
8	2011	Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Asli tradisional di Kab. Purbalingga	DIPA Unsoed 2011	
9	2012	Inerpretasi Hakim terhadap Konsep Keadilan Substantif dalam kasus Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri se eks Karesidenan Banyumas	DIPA Unsoed 2012	
10	2013	Masalah Al-Mursalah Sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Dalam Perkawinan (Analisis Terhadap Perkawinan Sirri Dan Permasalahanya)	Biaya Sendiri	

#### IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Tahun	Judul Pengabdian Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah Rp.
1	2005	Hukum Pernikahan dalam Islam	FH. Unsoed	
2	2007	Corak Tasawuf Al-Ghazaly	FH. Unsoed	
3	2007	Perlindungan Hukum dan Permasalahan Pekerja Anak	FH. Unsoed	
4	2008	Kajian Hukum Tentang Pornografi dalam Media Massa	FH. Unsoed	
5	2008	Haidh dalam Prespektif Islam	FH. Unsoed	
6	2008	Perkawinan Sirri Dalam Prespektif Hukum	FH. Unsoed	
7	2008	Permasalahan Pekerja Seks Komersial (PSK)	FH. Unsoed	
8	2008	Kajian Hukum Positif dan Islam	FH. Unsoed	



		Tentang Perzinahan		
9	2009	Kajian Sosiologis Kehidupan Waria	FH. Unsoed	
10	2009	Sejarah Pembentukan Hukum dan Lembaga Hukum Islam Di Indonesia	FH. Unsoed	
11	2009	Kajian Historis Kompilasi Hukum Islam	FH. Unsoed	
12	2010	Prespektif Hukum Nikah Sirri	FH. Unsoed	
13	2010	Islam dan Perlindungan terhadap anak	FH. Unsoed	
14	2011	Pelacuran dalam perespektif Hukum	Mandiri	
15	2011	Peran Perguruan Tinggi Dalam Masyarakat	Mandiri	
16	2012	Perlindungan Anak Dalam Masyarakat Islam	Mandiri	

#### V. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor	Penerbit/Jurnal
1	2003	Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia		Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Unsoed
2	2004	Mahasiswa Tanpa Kampus		Jurnal PMII STAIN Purokerto
3	2005	Neo Sufisme Al-Ghazaly		Jurnal Ibda STAIN Purwokerto
4	2012	Perlindungan Anak Dalam Masyarakat Islam		Proceding LPM Unsoed
5	2012	Sengketa Agraria Pada Tanah Wakaf		Proceding LPM Unsoed

#### VI. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1	2005	Pendidikan Agama Islam	253	Unsoed
2	2008	MPK Pendidikan Agama Islam	232	Unsoed
2	2009	Pendidikan Agama Islam	224	Unsoed
4	2010	Pendidikan Agama Islam	224	Unsoed
5	2011	Pendidikan Agama Islam	250	Unsoed
6	2011	GBPP- SAP PAI	41	Cetak sendiri
7	2011	Modul Perkuliahan PAI Smt.Genap 2011	142	Cetak sendiri
8	2011	Model Praktik Hukum Pidana Pengadilan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri	72	Cetak sendiri



**VII. PENGALAMAN RUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL**

No.	Tahun	Judul / Tema HKI	Jenis	Nomor Pendaftaran/ Sertifikat
1	2010	Raperda Buruh Migran Kab.Cilacap	Raperda	-

**Kegiatan Profesional/Pengabdian Kepada Masyarakat**

Tahun	Kegiatan
2000 s.d 2013	Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat
1994 s/d 1997	
2006 - 2008	Bimbingan Teknis dan Legal Drafting PKHKD dengan DPRD Purbalingga. Banjarnegara, Wonosobo, Cilacap, Tegal, Banyumas

**ORGANISASI PROFESI/ILMIAH**

Tahun	Organisasi	Jabatan
2000	Pusat Kajian Hukum dan HAM Fak.Hukum Unsoed	
2002 - sekarang	Pusat Kajian Hukum dan Kemitraan Daeran	Anggota
2010- 2014	Sekretaris Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Fak. Hukum Unsoed	Sekretaris

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dan apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resiko.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya

Purwokerto,

2013



Drs. NOOR ASYIK, MA.g  
NIP.19671020 199803 1 002

**Anggota 4 :****CURRICULUM VITAE**

1. Nama : H. Mukhsinun, S.H. M.H.
2. Tempat/Tgl/lahir : Cilacap / 12 Pebruari 1959
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pangkat/Gol/NIP : Lektor Kepala/IV.a/195902121987021001
5. Jabatan : Dosen tetap Fak. Hukum UNSOED
6. Alamat : Fakultas Hukum Unsoed Grendeng Pwt
7. Telp./Faks : 0281-638339
8. Pendidikan : 1. S-1 Univ. Brawijaya Malang 1986  
2. S-2 Univ. Jenderal Soedirman 2005
9. Alamat Rumah : Jl. Karang Benda I / 8 Berkoh  
Purwokerto Selatan Banyumas

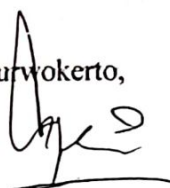
**PENGALAMAN PENELITIAN**

NO	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	1995	Perilaku Pemilihan Hukum Waris (Studi tentang aspirasi hokum dalam rangka mengantisipasi terbentuknya hokum waris nasional sehubungan dengan berlakunya hokum waris Islam dan Hukum Waris Adat di kalangan masyarakat propinsi Jateng	Hibah Bersaing DIKTI	
2	2012	Dasar-dasar Perkawinan di Indonesia Menurut UU No. 1 Thaun 1974 dan Kompilasi Hukum	SPP DPP Unsoed	

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dan apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resiko. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya

Purwokerto,

2013



H. Mukhsinun, SH., MH  
NIP. 195902121987021001

K. Rincian Anggaran

No.	URAIAN	VOLUME		BIAYA		JUMLAH TOTAL
		Jml	Satuan	Harga Satuan	Jml Harga	
<b>A.</b>	<b>BIAYA PERSONIL</b>					
1.	<b>HONOR TIM PELAKSANA :</b>					
	- Ketua Tim Pelaksana 1 org, 3 bln	3	org/bln	150.000	450.000	
	- Sekretaris 1 org, 3 bln	3	org/bln	125.000	375.000	
	- Anggota 4 org, 3 bln	12	org/bln	100.000	1.200.000	
						<b>2.025.000</b>
2.	<b>HONOR TIM AHLI :</b>					
	- Konsultan Ahli	5	org	9.000.000	45.000.000	
						<b>45.000.000</b>
	<b>JUMLAH A</b>					<b>47.025.000</b>
<b>B.</b>	<b>BIAYA NON PERSONIL</b>					
	<b>ALAT TULIS KANTOR :</b>					
	- Kertas HVS	10	pak	35.000	350.000	
	- Kertas Buram	6	pak	15.000	90.000	
	- Amplop panjang/kabinet	2	doos	13.400	26.800	
	- Reffil isi printer	2	bh	125.000	250.000	
	- Spidol white board	7	bh	8.500	59.500	
	- Binder clips	7	doos	11.500	80.500	
	- Bollpoint boxy	10	bh	7.000	70.000	
	- Pensil	5	bh	3.000	15.000	
	- Materai	30	bh	6.000	180.000	
	- Snelhecter	35	bh	1.000	35.000	
	- Stop Map plastik	35	bh	5.000	175.000	
					-	
	<b>Cetak &amp; Penggandaan :</b>					
	- Cetak Buku NA	20	set	40.000	800.000	
	- Foto copy draft raperda &		lbr			



surat2	38.000		150	5.700.000	
					7.831.800
<b>MAKAN DAN MINUM RAPAT</b>					
- Rapat-Rapat Tim 10 org x 6 kali	60	org/kl	27.500	1.650.000	
- Rapat FGD, 50 org, 2 kl	100	org/kl	27.500	2.750.000	
					4.400.000
<b>TRANSPORTASI &amp; AKOMODASI</b>					
- Perjalanan Tim Pelaksana Dalam Daerah, 7 org, 5 kl	35	org/kl	125.000	4.375.000	
- Sewa Mobil, 1 unit, 7 kl	7	unit/kl	650.000	4.550.000	
					8.925.000
<b>JUMLAH B</b>					<b>21.156.800</b>
<b>JUMLAH A + B</b>					<b>68.181.800</b>
PAJAK 10 %					6.818.180
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>74.999.980</b>
PEMBULATAN					<b>75.000.000</b>